

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh

Nurhayati

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Penelitian ini dilakukan pada komisi independen pemilihan (KIP) Aceh yang memenuhi Kriteria 35 orang populasi. Jenis data penelitian ini adalah data subjek (*self report data*), Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana.

Hasil penelitian ini menemukan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien R Square nilai koefisien korelasi/hubungan (R) 0.279^a dan pengaruh R Square 0.078. Hal ini berarti bahwa Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh dipengaruhi faktor Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah sebesar 0.8 %. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.

Kata kunci: *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Dalam era reformasi ini di setiap negara di seluruh dunia termasuk Indonesia pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance*. Salah satu reformasi yang prioritas berjalan saat ini di Indonesia adalah mewujudkan kinerja pemerintah yang baik dan memuaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerbitkan perangkat / peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara / daerah. yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Dengan adanya Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Fajar, 2010).

Penyajian Laporan keuangan yang berkualitas, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah salah satunya adalah adanya Sistem Informasi Akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi pemerintahan dikatakan memadai atau efektif dan efisien jika didalam system informasi akuntansi tersebut terkandung *karakteristik* yang terdiri dari : *usefulness, economy, reliability, customer service, capacity, simplicity dan flexibility*, Rimbawa (2008:12-13). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun lapran keuangan yang berkualitas perlu terlebih dahulu menyusun sistem infprmasi akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mardiasmo, (2006) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah rata-rata masih lemah.

Dalam penyajian Laporan Keuangan KIP Aceh tersebut dilandasi dengan Sistem informasi akuntansi, yang merupakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi dan manual adalah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tersedianya Sistem Informasi Akuntansi pada organisasi Pemerintah KIP Aceh telah didukung dengan beberapa personil yang ahli dan peralatan computer yang cukup sehingga mempermudah membuat pertanggung jawaban berupa laporan keuangan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh.

Dari hasil pengamatan penulis dilaporkan masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam pengelolaan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan belum akurat secara maksimal, diantaranya dipengaruhi lemahnya penerapan sistem informasi akuntansinya atau masih terdapat kekurangan kekurangan atau belum memadai. Fakta dilaporkan menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan belum akurat dan belum tepat waktu, rendahnya ketelitian. Hal ini disebabkan, diprediksi penerapan sistem informasi keuangan belum optimal, diantaranya penyajian laporan keuangan tahunan sebagai pertanggung-jawaban terlambat, realisasi anggaran yang tidak memenuhi target, data yang tidak akurat. Hal ini terjadi, karena sistem informasi akuntansi belum memenuhi kriteria sistem informasi akuntansi, seperti menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, laporan keuangan belum mudah dapat dipahami oleh masyarakat, belum ekonomis, dan sebagainya.

Menurut Ruchyat Kosasi (2002) dalam Febryanty (2007:13) mengatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dikatakan memadai atau efektif dan efisien bagi suatu organisasi harus memiliki karakteristik : 1) relevan, dan tepat waktu (*usefulness*), 2) sumbangan besar (*economy*), 3) andal, akurat (*reliability*), 4) layanan yg baik (*customer service*), 5) berjalan normal (*capacity*), 6) sederhana (*simplicity*) dan 7) dapat menyesuaikan (*flexibility*), dalam menghasilkan laporan keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan latar belakang masalah sebagai berikut: Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Komisi Independen Pemilu Aceh.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah pada organisasi pemerintah Komisi Independen Pemilu Aceh
2. Mengetahui dan menggambarkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Komisi Independen Pemilu Aceh
3. Menguji dan membuktikan Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Komisi Independen Pemilu Aceh

LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan

laporan keuangan menurut Bambang Riyanto (2010:327) yaitu laporan keuangan memberikan ikhtisar

mengenai keadaan finansial suatu perusahaan dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hal-hal yang dicapai selama suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Mardiasmo (2006:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Tujuan Laporan Keuangan

Mardiasmo (2006:37) memaparkan bahwa secara garis beesar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi social dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (caLK).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi,2001) dalam Rohman, Abdul. (2009:34).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Penerapan sistem akuntansi keuangan merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

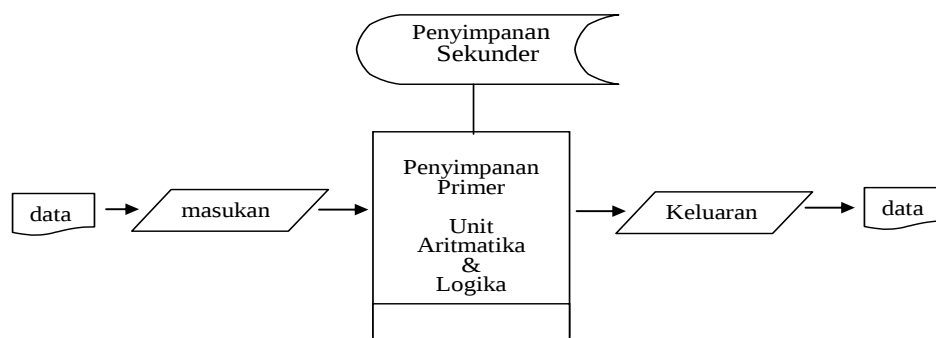
Dengan memperhatikan pengertian system informasi akuntansi dapat diketahui bahwa system informasi akuntansi memiliki unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh Susanto, (2003), dalam Puji. 2010:13) sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia.
2. Peralatanyang digunakan.
3. Metode

Marshall B, (2006:03) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi akan berfungsi baik/memadai apabila terdiri dari lima komponen :

- 1) orang-orang benar dalam mengoperasikannya,
- 2) prosedur-prosedur yang jelas baik manual maupun otomatisasi,
- 3) data yang akurat ,
- 4) software yang dipakai untuk memproses data
- 5) Infrastruktur teknologi informasi memadai, termasuk komputer dan peralatan pendukung untuk komunikasi jaringan.

Menurut Jogiyanto (2006:34) komponen-komponen yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi menggunakan komputer dapat dilihat dalam bentuk diagram/gambar sebagai berikut :



Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi.

Menurut Clusing (2000) dalam Rimbawa (2006:12) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Relevan dan tepat waktu (*Usefulness*)).

Sistem informasi akuntansi harus menghasilkan suatu informasi yang berguna, ini berarti informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan (handal) dan tepat waktu sehingga berguna bagi

manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.

- 2) Sumbangan yang besar (*Economy*)
Seluruh komponen dalam sistem informasi akuntansi harus dapat memberikan sumbangan yang besar dari biaya yang dikeluarkan.
- 3) Teliti dan efektif (*Reliability*)
Produk yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi harus dapat diandalkan, informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi harus memiliki ketelitian yang tinggi dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif.
- 4) Pelayanan yang baik (*Customer Service*).
Sistem informasi akuntansi harus memberikan suatu layanan yang baik dan efisien kepada para pelanggan dan pihak lainnya.
- 5) Sederhana (*Simplicity*)
Sistem informasi akuntansi harus bersifat sederhana sehingga semua struktur dan operasinya dapat dimengerti serta prosedurnya dapat diikuti dengan mudah.
- 6) Normal pada full Kapasiti (*Capacity*)
Kapasitas dari suatu sistem informasi akuntansi harus memadai untuk menghadapi operasi pada kapasitas penuh seperti halnya pada operasi normal.
- 7) Luwes (*Flexibility*)
Sistem harus luwes dalam menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain meliputi pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2012: 43) didefinisikan sebagai berikut: Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Karakteristik Organisasi Pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2006:8) karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

1. Tujuan Organisasi
2. Sumber Pembiayaan
3. Pola PertanggungJawaban
4. Struktur Organisasi
5. Karakteristik Anggaran
6. Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Indra Bastian (2007:98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi

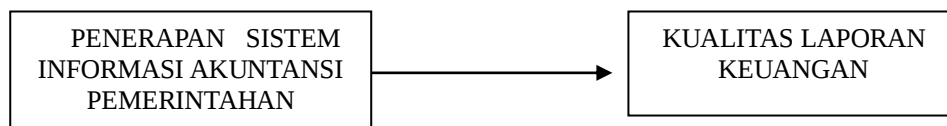
Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah: Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintahan daerah yang handal, yang bias dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah adalah: Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APDB yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah dilaksanakan Oleh Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan bahwa system akuntansi pemerintah meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
5. Penyajian Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

Ho : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh .

Ha : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh

METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dilingkungan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang berjumlah 35 orang dengan memiliki kriteria (populasi sasaran) sebagai berikut :

1. Pejabat dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang masih aktif dan terlibat langsung dalam system informasi akuntansi laporan keuangan KIP Aceh.
2. Pegawai tetap sebagai staf yang aktif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan system informasi akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dilingkungan KIP Aceh
3. Unsur Pengawas keuangan dilingkungan KIP Aceh.

Setelah penetapan kriteria tersebut maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 35 responden dan populasi ini peneliti jadikan sasaran atau populasi sasaran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini adalah data subjek (*self report data*), yaitu jenis data berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada responden sebanyak 35 responden. (Kuncoro,2003 dalam Ira, Dkk, 2013:16)

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada variabel lain atau disebut juga variabel bebas. penerapan sistem akuntansi keuangan merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan sebagai pedoman bagi pemerintah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007)

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel dependen adalah Kualitas Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71, 2010)

Metode Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan alat statistik yaitu regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji dan menganalisis, pengaruh variabel Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Aceh. Data di olah dengan menggunakan program *Statistik Package For social Science* (SPSS). Adapun bentuk matematisnya regresi linier sederhana (Ghozali 2007:67) sebagai berikut : $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- α = Konstanta
- β , = Koefisien Regresi
- X = Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan
- ε = Error term

Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik : Ghozali (2012:112). Dengan pendekatan grafik, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, sebaran Plot pada *Graph P-P Plot* berbentuk linear dan tertumpu di sekitar garis diagonal *P-P Plot*. dan Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan bila signifikan hitung > 0,05; berarti data terdistribusi normal demikian sebaliknya, bila signifikan hitung < 0,05; berarti data tidak terdistribusi normal, Ghozali (2012:112).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatter plot*. (Ghozali, (2006:56)

Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan sesuai dengan regresi sederhana yang digunakan, maka dilakukan uji secara parsial (uji-t) untuk mengetahui pengaruh peneraan system informasi akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Aceh.

Untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen (penerapan system informasi akuntansi keuangan) terhadap variable dependen (kualitas laporan keuangan) dapat dilakukan dengan langkah-langkah (Ghozali, 2007:121) sebagai berikut:

- Menentukan hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a)
- $H_0 : \beta_1 = 0$; penerapan system informasi akuntansi keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan Pemerintahan pada Komisi Independen Pemilihan Aceh

- H_a : paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$; penerapan system informasi akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan pada Komisi Independen Pemilihan Aceh
- Jika $\beta_1 = 0$; H_0 diterima
- H_a : paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$; H_0 ditolak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah dan Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah	3.7723	0.23256	35
Kualitas Laporan keuangan	3.2071	0.28017	35

Sumber : Data primer (diolah), 2017

Tabel 1 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 35 responden. Variabeli Nilai penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah sebesar 3.773. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ini, yaitu relative baik., sedangkan Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh 3.2071, berarti bahwa Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh yang dicapai sebesar 3.2071, relative rendah.

Standar deviasi untuk masing-masing variabel penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah (0.23256) dan Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh 0.28017. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti pernyataan dalam variabel tersebut semakin bervariasi. Semakin rendah tingkat standar deviasinya maka semakin homogen artinya bahwa variasi jawaban atau pernyataan semakin kecil.

Hasil Uji Validitas dan Realibitas

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh suatu kuesioner. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat signifikansi koefisien korelasi antara masing-masing indikator atau item pertanyaan terhadap total skor variabel (Ghozali, 2006). Nilai probabilitas dikatakan signifikan jika $p < 0,05$. Hasil uji validitas data ditampilkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Data

a. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	0.481	0.266
B2	0.447	0.266
B3	0.394	0.266
B4	0.453	0.266
B5	0.540	0.266
B6	0.541	0.265

b. Variabel Kualitas Laporan keuangan (Y)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	0.479	0.266
B2	0.426	0.266
B3	0.426	0.266
B4	0.404	0.266
B5	0.638	0.266

Sumber: Data Primer 2017, (diolah)

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masing-masing item dari variabel penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah dan Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh berada diatas nilai kritis korelasi *product moment* (koefisien korelasi > 0.266 , sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini uji reabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Menurut Nunnally (1960) dalam Marzuki, (2012:33), suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,50$ (Ghozali, 2006). Dalam tabel 3 disajikan hasil uji reabilitas.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Rata-rata	Jumlah Item	Nilai Alpha	Keandalan
1	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah	15.8333	5	0.648	Handal
2	Kualitas Laporan Keuangan	31.4444	5	0.702	Handa

Sumber: Data Primer 2017 (diolah)

Berdasarkan reabilitas terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya sama atau lebih

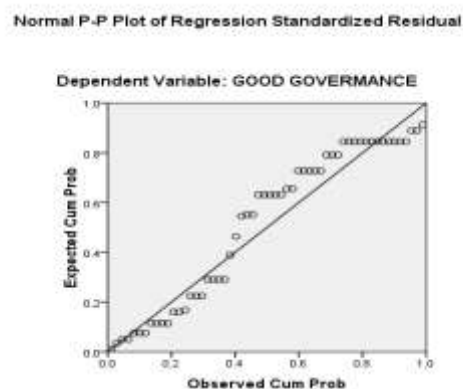
besar dari Alpha 0.50, (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal, yaitu model regresi yang baik adalah jika model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu analisis grafik *probability plot*, dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, sebagai berikut :

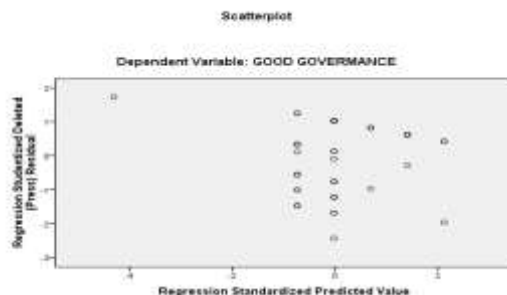
Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Pada gambar 1 tampilan grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi homokedastisitas dan heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*Z-PRED*) dengan *residual*nya (*SRESID*), jika pada grafik terdapat pola tertentu yang teratur antara *SRESID* dan *Z-PRED*, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 2



Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Regresi

Untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi Akuntansi keuangan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan digunakan regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 17.0 for Windows Evolution Version, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terinci dapat dilihat pada tabel 4.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.797	.353		6.273	.000
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH	.232	.114	.624	4.586	.000

a. Dependent Variable: KLTS LAP. KEUANGAN

$$Y = 3,797 + 0,232x + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut : nilai konstanta sebesar 3.797 . Artinya bilamana faktor Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah tetap, maka Kualitas Laporan keuangan pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, mengalami kenaikan sebesar 3.797. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah mempunyai koefisien (b) sebesar 0.232 yang berarti koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan nol ($b1 \neq 0$). Artinya setiap satuan perubahan dalam variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah akan mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Aceh sebesar 0.232

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2).

Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Priyanto, 2008). Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.624 ^a	.389	.371	.30534	.733

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem informasi akts

b. Dependent Variable: KLTS LAP. KEUANGAN

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa : a) nilai koefisien korelasi/hubungan (R) : 0.624^a dan pengaruh (R Square) = 0.389. Hal ini berarti bahwa Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen

Pemilihan Aceh dipengaruhi faktor penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah sebesar 62,4 %. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor lainnya yang tidak diteliti di variabel ini.

Uji secara parsial

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap good govenmant Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dilakukan uji secara parsial (uji t). Untuk lebih jelasnya pada tabel 5.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.797	.457		8.302	.000
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah	0.232	.108	.279	2.138	.037

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan table 5 maka koefisien regresi secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil pengujian data diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah mempunyai $t_{hitung} = 2.138 > \text{tabel } (2.00488)$ dengan tingkat signifikan 0.037 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima . Hal ini berarti bahwa variable Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Aceh .

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel X (Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah) mempunyai t-hitung sebesar 2.138 lebih besar t-table (2.0488) dengan koefisien sebesar 0.232. Hal ini menunjukkan bahwa, penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji juga memberikan makna lain yaitu pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh adalah sebesar 0.232 atau 23,2% adalah relative rendah karena dibawah 50 %. Artinya bahwa sebagian besar (76,80 %) Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh dipengaruhi oleh variable lain selain penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah seperti fungsi internal audit, gaya kepemimpinan dan sebagainya.

Disamping itu, makna lain yang terkandung dengan hasil penelitian ini adalah tata kelola dengan prinsip Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh yaitu penyelenggaraan aktivitas-aktivitas dalam Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah berjalan dengan sehat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara parsial terdapat pengaruh positif penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh Hasil uji t_{hitung} $2.138 > \text{tabel } (2.0488)$. Hal ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya terjadi peningkatan pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah yang dilakukan Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh akan mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh
2. Hubungan antara variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemiihan Aceh relative kurang kuat, hal ini dapat dilihat hasil uji $R \text{ square}$ pada *Model Summary* yaitu sebesar 0.389 atau 38,9% , yaitu dibawah 50 %, jadi hubungan positif akan tapi relatif kurang kuat.

Saran

1. Disarankan kepada Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh untuk mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh dengan meningkat fungsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah seperti jangan ada lagi kerja rangkap, menempatkan personil sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan pengawasan terhadap bawahan.
2. Disarankan Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh disamping meningkatkan fungsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah juga meningkatkan fungsi non internal control seperti fungsi internal audit, fungsi monitoring dan fungsi pengawasan melekat dan sebagainya. sehingga dapat meningkatkan pengawasan dilingkungan Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh
1. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Laporan keuangan Pada Komisi Independen Pemiihan Aceh , selain meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah, disarankan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Komisi Independen Pemiihan (KIP) Aceh yang belum mempunyai pendidikan pada perguruan tinggi atau sederajat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi Sekor Publik: Suatu Pengantar**. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam, (2012), **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS** Cetakan IV, Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul. (2012). **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, Sofyan
- Jogiyanto, H.M (2006), **Sistem Infomasi Akuntansi Berbasis Komputer**, Buku Satu, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010) **tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** .
- Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun (2005) **tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun (2007) **tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Puji. 2010. **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Jurnal akuntansi Pemerintah. Jones, B.M.R. dan
- Rohman, Abdul. (2009). **Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah**. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis
- Romney, Marshall B., Stembart and Paul John. (2006). **Accounting Information System**. New Jersey : Prentice Hall.